



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHBUDINSYAH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 453239

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.678.724.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/94 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, LAINNYA Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/189 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, LAINNYA Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 456 m2/84 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, LAINNYA Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 625 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 31.250.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 987.16 m2/232 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 482.474.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/126 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 28.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA 14D(AC115C/MIOSOUL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA/BJ8 W A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 2.950.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.348.854
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.713.022.854
III. HUTANG	Rp.	663.455.328
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.049.567.526

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HELENA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHH : 755120

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, WARISAN
Rp. 200.000.000
2. Bangunan Seluas 148 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, WARISAN
Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU,
WARISAN Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 142.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 133.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 231.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 45.207.835

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.418.707.835

III. HUTANG Rp. 49.243.101

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.369.464.734

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD SYAHRIZAL
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 425564

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 624 m2/55 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 42.000.000

1. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, HONDA. BEAT/NC11B3 A/T BEAT/NC11B3 A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 65.581.710

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 273.281.710

III. HUTANG Rp. 14.879.571

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 258.402.139

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.